

**BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON**



**NOMOR 126 TAHUN 2020 SERI E**

---

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 123 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL

PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SUMBER  
KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan kesehatan merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, bersifat wajib, dan terkait dengan pelayanan dasar;
- b. bahwa untuk menjamin tercapainya sasaran dan prioritas pembangunan nasional bidang kesehatan, diperlukan pedoman Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal untuk Unit Kerja yang akan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal

pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Sumber Kabupaten Cirebon.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
  13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
  14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

- (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 15, Seri E.6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2009 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita di Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 3, Seri E.3);
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 7, Seri E.2);
  18. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 61 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 61, Seri D.10);
  19. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 11, Seri D.1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 18, Seri D.2);
  20. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 43 Tahun 2018 tentang Organisasi, Fungsi Tugas Pokok dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 43, Seri D.11).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SUMBER KABUPATEN CIREBON.**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.
3. Bupati adalah Bupati Cirebon.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah Kabupaten Cirebon yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan Daerah Kabupaten Cirebon.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Sumber, yang selanjutnya disebut Puskesmas Sumber adalah UPTD Puskesmas Sumber.
9. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
10. Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, yang selanjutnya disingkat SPM Kesehatan merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

11. Indikator SPM adalah tolak ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan dasar.
12. Pelayanan Kesehatan Puskesmas, yang selanjutnya disebut Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan dan pelaporan yang dituangkan dalam suatu sistem.
13. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara.
14. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
15. Upaya Kesehatan Perorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
16. Puskesmas nonrawat inap merupakan Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan rawat jalan, perawatan di rumah (*home care*), pelayanan gawat darurat, dan pelayanan persalinan normal bagi Puskesmas yang tersedia fasilitas pelayanan persalinan normal.
17. Puskesmas rawat inap merupakan Puskesmas yang diberi tambahan sumber daya sesuai pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan untuk menyelenggarakan rawat inap pada pelayanan persalinan normal dan pelayanan rawat inap pelayanan kesehatan lainnya.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Standar Pelayanan Minimal dimaksudkan untuk memberi

pedoman kepada pemerintah daerah dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan pada Puskesmas.

- (2) Standar Pelayanan Minimal bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

### BAB III

#### TUGAS, JENIS PELAYANAN, INDIKATOR, STANDAR NILAI, BATAS WAKTU PENCAPAIAN DAN URAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

##### Bagian Kesatu

##### Tugas Puskesmas

##### Pasal 3

Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.

##### Bagian Kedua

##### Jenis Pelayanan, Indikator, Standar Nilai, dan Batas Waktu Pencapaian

##### Pasal 4

Jenis pelayanan yang ada di Puskesmas Sumber, meliputi :

- a. UKP tingkat pertama; dan
- b. UKM tingkat pertama.

##### Pasal 5

UKP tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi :

- a. pelayanan pemeriksaan umum;
- b. pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
- c. pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKP;
- d. pelayanan gawat darurat;
- e. pelayanan gizi yang bersifat UKP;
- f. pelayanan farmasi; dan
- g. pelayanan laboratorium.

## Pasal 6

UKM tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi :

- a. pelayanan kesehatan ibu hamil;
- b. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- c. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- d. pelayanan kesehatan balita;
- e. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- f. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- g. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- h. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- i. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
- j. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- k. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;
- l. pelayanan kesehatan orang dengan risiko tertular virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV);
- m. pelayanan imunisasi;
- n. pelayanan penyakit menular lainnya (kusta, DBD, ISPA/pneumonia, diare, Filariasis, dan Hepatitis);
- o. pelayanan promosi kesehatan;
- p. pelayanan kesehatan lingkungan;
- q. pelayanan gizi;
- r. pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat;
- s. pelayanan kesehatan gigi masyarakat;
- t. pelayanan kesehatan kerja;
- u. pelayanan kesehatan olahraga;
- v. pelayanan kesehatan tradisional komplementer;
- w. pelayanan kesehatan indera; dan
- x. pelayanan kesehatan pengembangan lainnya (Surveilens).

## Pasal 7

- (1) Indikator, Standar Nilai, Batas Waktu Pencapaian pada setiap jenis pelayanan untuk Upaya Kesehatan Perorangan pada Puskesmas Sumber tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Indikator, Standar Nilai, Batas Waktu Pencapaian pada jenis pelayanan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat pada Puskesmas Sumber, tercantum dalam Lampiran II yang



merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) Uraian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV PELAKSANAAN

### Pasal 8

- (1) Puskesmas yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) wajib melaksanakan pelayanan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Pemimpin Puskesmas yang menerapkan BLUD bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan yang dipimpinnya sesuai Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal dilakukan oleh tenaga kesehatan dan non kesehatan dengan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V PENERAPAN

### Pasal 9

- (1) Pemimpin Puskesmas yang menerapkan BLUD menyusun rencana kerja dan anggaran, target, serta upaya dan pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan Puskesmas yang dipimpinnya berdasarkan Standar Pelayanan Minimal.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan format Rencana Bisnis dan Anggaran.
- (3) Setiap pelaksanaan pelayanan, dan penyelenggaraan pelayanan yang menjadi tugasnya, dilaksanakan dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal.

BAB VI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu  
Pembinaan

Pasal 10

- (1) Pembinaan teknis Puskesmas yang menerapkan BLUD dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (2) Pembinaan keuangan Puskesmas yang menerapkan BLUD dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berupa fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan latihan atau bantuan teknis lainnya yang mencakup :
  - a. perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal;
  - b. penyusunan rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal dan penetapan target tahunan pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
  - c. penilaian prestasi kerja pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
  - d. pelaporan prestasi kerja pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
  - e. penyusunan peraturan perundang-undangan untuk implementasi BLUD pada Puskesmas yang bersangkutan;
  - f. penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran;
  - g. pelaksanaan anggaran; dan
  - h. akuntansi dan pelaporan keuangan.

Bagian Kedua  
Pengawasan

Pasal 11

- (1) Pengawasan dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Cirebon.
- (2) Selain pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat juga dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal.

- (3) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh internal auditor yang berkedudukan langsung dibawah Pemimpin BLUD Puskesmas.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 30 November 2020

**BUPATI CIREBON,**

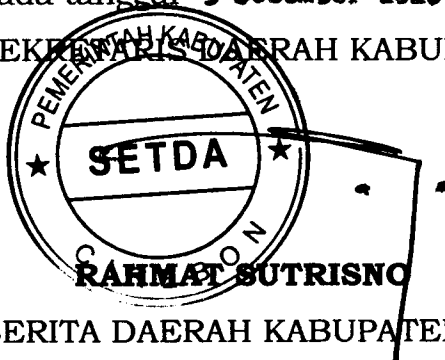
ttd

**IMRON**

Diundangkan di Sumber

pada tanggal ~~3~~ **Desember 2020**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2020 NOMOR **126** SERI **B**

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI CIREBON.

NOMOR : 123 TAHUN 2020

TANGGAL : 30 NOVEMBER 2020

TENTANG : STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN  
MASYARAKAT SUMBER KABUPATEN CIREBON

**INDIKATOR, STANDAR NILAI, BATAS WAKTU PENCAPAIAN PADA JENIS PELAYANAN  
UNTUK UPAYA KESEHATAN PERORANGAN PADA PUSKESMAS SUMBER**

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Standar	Pencapaian Awal	Rencana Pencapaian Tahun					Penanggung Jawab	Keterangan
					2019	2020	2021	2022	2023		
1	Pelayanan pemeriksaan umum	Waktu tunggu pendaftaran < 10 menit	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Koordinator pendaftaran	
		Kelengkapan informed consent setelah mendapatkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Petugas rekam medik	

	informasi yang jelas												
	Pelayanan pemeriksaan umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dokter	
	Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan	10 menit	10 menit	10 menit	8 menit	8 menit	8 menit	8 menit	8 menit		Petugas rekam medik		
	Pelayanan pemeriksaan penyakit tidak menular	20%	10%	10%	15%	17%	18%	20%			Petugas PTM		
	Pelayanan pemeriksaan lansia	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%		Petugas Lansia		

2	Pelayanan kesehatan gigi dan mulut	Pemeriksaan gigi dan mulut	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	3%	3,5%	4%	Dokter dan perawat gigi		
3	Pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKP	Pelayanan KIA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Bidan koordinator		
		Pelayanan KB	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Bidan koordinator		
		Pelayanan imunisasi	100%	95%	97,5%	97,5%	97,5%	100%	100%	100%	Koordinator imunisasi	
		Pelayanan MTBS	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	Bidan koordinator	
4	Pelayanan gawat darurat	Pemberi pelayanan kegawat daruratan bersertifikat (ATLS/BTLS/ACLS/PPGD/GELS) yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dokter / Perawat		



		Tidak adanya kejadian salah pemberian obat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Apoteker	
7	Pelayanan laboratorium	Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium darah < 30 menit	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Petugas Analis	
		Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Petugas Analis	
		Kemampuan memeriksa HIV dan IMS	Ada Alat	Ada Alat	Ada Alat	Ada Alat	Ada Alat	Ada Alat	Ada Alat	Ada Alat	Ada Alat	Ada Alat	Ada Alat	Petugas Analis	



	Kemampuan Mikroskopis TB paru	Ada Alat	Ada Alat	Ada Alat	Ada Alat	Ada Alat	Ada Alat	Ada Alat	Petugas Analis	
--	-------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------------	--

**BUPATI CIREBON,**

*ttđ*

**IMRON**

Diundangkan di Sumber

pada tanggal **3 Desember 2020**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,**

**RAHMAT SUTRISNO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2020 NOMOR 126 SERI 1**

	Kemampuan Mikroskopis TB paru	Ada Alat	Ada Alat	Ada Alat	Ada Alat	Ada Alat	Ada Alat	Ada Alat	Petugas Analis	
--	-------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------------	--

**BUPATI CIREBON,**

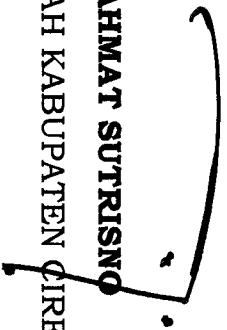
*tttd*

**IMRON**

Diundangkan di Sumber

pada tanggal **3 Desember 2020**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

  
**RAHMAT SUTRISNO**

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2020 NOMOR **126** SERI **B**

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI CIREBON.

NOMOR : 123 TAHUN 2020

TANGGAL : 30 NOVEMBER 2020

TENTANG : STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN  
MASYARAKAT SUMBER KABUPATEN CIREBON

**INDIKATOR, STANDAR NILAI, BATAS WAKTU PENCAPAIAN PADA JENIS PELAYANAN  
UNTUK UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PADA PUSKESMAS SUMBER**

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Standar	Pencapaian Awal	Rencana Pencapaian Tahun					Penanggung Jawab	Keterangan
					2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100%	102,34%	99%	99%	100%	100%	100%	Bidan Koordinator KIA	
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100%	97,70%	100%	100%	100%	100%	100%	Bidan Koordinator KIA	

3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	103,54%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Bidan koordinator KIA	
4	Pelayanan kesehatan balita	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100%	98,45%	99%	99%	100%	100%	100%	100%	100%	Bidan koordinator KIA	
5	Pelayanan kesehatan pada usia Pendidikan Dasar	Persentase anak usia Pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	100%	96%	98%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Penanggung jawab program UKS	

6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	95%	40 %	60%	80%	90%	100%	Penanggung jawab program PTM	
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	100%	40%	60%	80%	90%	100%	Penanggung jawab program Lansia	
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	82,2%	100%	100%	100%	100%	100%	Penanggung jawab program PTM	

9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus (DM)	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	30%	50%	60%	80%	100%	Penanggung jawab program PTM	
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	80%	90%	100%	100%	100%	Penanggung jawab program kesehatan jiwa	
11	Pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis (TB)	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Penanggung jawab program TB	

12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100%	100%	85 %	90 %	100%	100%	100%	100%	100%	Penanggung jawab program HIV	
13.	Pelayanan imunisasi	a. Cakupan Desa /Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	93%	100%	83%	84%	86%	88%	100%	100%	100%	Koordinator imunisasi dan bidan penanggung jawab desa	
	b. Cakupan IDL		93%	98,5%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Koordinator imunisasi dan bidan penanggung jawab desa	





		e. Cakupan tatalaksana kasus Filariasis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Koordinator P2M dan surveilans	
15.	Pelayanan promosi kesehatan	Pembinaan PHBS di tatanan rumah tangga	100%	41,60%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Penanggung jawab program Promkes	
16.	Pelayanan kesehatan lingkungan	Persentase penduduk terhadap pengawasan rumah sehat	85%	87,99%	45%	50 %	60%	70%	85%				Penanggung jawab program Kesling	
17.	Pelayanan gizi	a. ASI Eksklusif	100%	76,56%	90%	95 %	100%	100%	100%	100%			Penanggung jawab program gizi	
		b. Remaja putri TTD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			Penanggung jawab program gizi	
		c. Persentase balita kurus mendapat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			Penanggung jawab program gizi	

		makanan tambahan																				
18.	Pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat	Cakupan keluarga resiko tinggi mendapat askep keluarga	88 %	100%	88 %	88%	88%	88%	88%	88%	88%	88%	88%	88%	88%	88%	88%	88%	88%	88%	Penanggung jawab program perkesmas	
19.	Pelayanan kesehatan gigi masyarakat	a. Cakupan pembinaan kesehatan gigi dan mulut di masyarakat	80%	100%	80%	80 %	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	Penanggung jawab program Kesglut	
		b. Cakupan pembinaan kesehatan gigi dan mulut di SD/MI	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Penanggung jawab program Kesglut	
20.	Pelayanan kesehatan kerja	Jumlah pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK) yang terbentuk di Wilayah Kerja Puskesmas	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Penanggung jawab program UKK	

21.	Pelayanan kesehatan olahraga	Pembinaan kelompok olahraga	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Penanggung jawab program Kesorga	
22.	Pelayanan kesehatan tradisional komplementer	Pembinaan upaya kesehatan tradisional	13%	61,13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	Penanggung jawab program Batra	
23.	Pelayanan kesehatan indera	a. Penanganan kasus kelainan refraksi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Penanggung jawab program kesehatan indera	
		b. Penanganan penyakit katarak	100%	59,54%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Penanggung jawab program kesehatan indera	
24.	Pelayanan kesehatan pengembangan lainnya (Survailens)	a. Cakupan kelengkapan survailens terpadu penyakit	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Penanggung jawab Survailens	

	b. Cakupan ketepatan surveilens terpadu penyakit	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Penanggung jawab Surveilens	
--	--	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------------------------	--

**BUPATI CIREBON,**

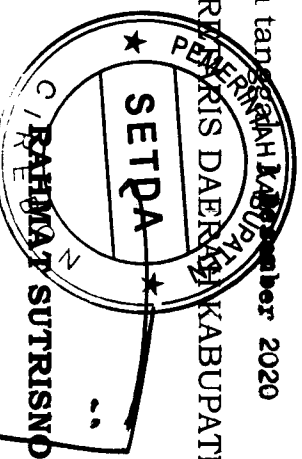
tttd

**IMRON**

Diundangkan di Sumber

pada tanggal 18 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2020 NOMOR 126 SERI ■

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 123 TAHUN 2020

TANGGAL : 30 NOVEMBER 2020

TENTANG : STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA UNIT  
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT  
KESEHATAN MASYARAKAT SUMBER  
KABUPATEN CIREBON

**A. INDIKATOR SPM UKP**

**1. Pelayanan Pemeriksaan Umum**

Judul	<b>Waktu tunggu pendaftaran &lt; 10 menit</b>
Dimensi Mutu	Kualitas dan keamanan
Tujuan	Teregistrasinya pasien sesuai dengan substandard waktu yang ditetapkan (cepat, tepat, dan akurat)
Definisi Operasional	Lama waktu pendaftaran adalah waktu yang dibutuhkan mulai dari pasien diidentifikasi sampai sesuai dengan standar sistem informasi kesehatan (SIK)
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah rata-rata yang dibutuhkan untuk registrasi sesuai standar SIK dalam kurun waktu tertentu
Denominator	Jumlah kunjungan yang teregistrasi dalam kurun waktu yang sama
Sumber Data	Registrasi kunjungan
Target	< 10 menit
Langkah Kegiatan	Persiapan sarana dan prasarana, pengaturan tenaga dan sampling survey
Penanggung Jawab	Koordinator pendaftaran

Judul	<b>Kelengkapan <i>informed concent</i> setelah mendapatkan informasi yang jelas</b>
Dimensi Mutu	Keselamatan
Tujuan	Tergambarnya catatan rekam medis dalam memberikan informasi kepada pasien dan

	mendapat Informasi dari pasien terhadap Rekam medis yang akan di berikan
Definisi Operasional	<i>Informed concent</i> adalah persetujuan yang diberikan pasien/keluarga pasien atas dasar penjelasan lengkap mengenai Rekam medis pasien
Frekuensi Pengumpulan Data	1 bulan
Periode Analisa	3 bulan
Numerator	Jumlah pasien yang di data
Denominator	Jumlah pasien yang mendapat rekam medis yang disurvei dalam 1 bulan
Sumber Data	Survei
Standar	100%
Penanggung Jawab	Petugas rekam medis

Judul	<b>Pelayanan pemeriksaan umum</b>
Dimensi Mutu	Kompetensi teknis
Tujuan	Tersedianya pelayanan rawat jalan oleh tenaga yang kompeten
Definisi Operasional	Pemberi pelayanan rawat jalan adalah dokter dan tenaga perawat yang kompeten (minimal D3)
Frekuensi Pengumpulan Data	6 bulan
Periode Analisa	6 bulan
Numerator	Jumlah tenaga dokter dan perawat yang memberi pelayanan diruang rawat Jalan yang sesuai dengan ketentuan
Denominator	Jumlah seluruh tenaga dokter dan perawat yang bertugas di pelayanan
Sumber Data	Kepegawaian
Target	100%
Penanggung Jawab	Dokter

Judul	<b>Waktu penyediaan dokumen rekam medis rawat jalan</b>
Dimensi Mutu	Efektivitas, kenyamanan, efisiensi

Tujuan	Tergambarnya kecepatan pelayanan saat pendaftaran rawat jalan
Definisi Operasional	Dokumen rekam medis rawat jalan adalah dokumen rekam medis pasien baru atau pasien lama yang digunakan pada pelayanan rawat jalan. Waktu penyediaan dokumen rekam medis mulai dari pasien mendaftar sampai rekam medis disediakan/ditemukan oleh petugas
Frekuensi Pengumpulan Data	Tiap bulan
Periode Analisa	Tiap tiga bulan
Numerator	Jumlah kumulatif waktu penyediaan rekam medis sampel rawat jalan yang diamati
Denominator	Total sampel penyediaan rekam medis yang diamati (N tidak kurang dari 50)
Sumber Data	Hasil survei pengamatan di ruang pendaftaran rawat jalan untuk pasien baru di ruang rekam medis untuk pasien lama
Standar	≤ 10 menit
Penanggung Jawab	Petugas rekam medis

Judul	<b>Pelayanan Pemeriksaan Penyakit tidak Menular</b>
Dimensi Mutu	Kompetensi, keselamatan dan kualitas
Tujuan	Semua Pasien dengan penyakit PTM yang membutuhkan layanan kesehatan dapat terlayani dengan baik sesuai SOP
Definisi Operasional	Pelayanan kesehatan yang diberikan terhadap pasien dengan penyakit PTM yang membutuhkan pelayanan kesehatan agar tetap terpelihara kesehatannya sehingga dapat menjaga kondisi tetap sehat dan produktif sesuai kemampuannya
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap hari dan direkap setiap bulan
Periode Analisa	Tiap bulan

Numerator	Jumlah pasien yang datang dan dilayani oleh petugas kesehatan setiap hari
Denominator	Jumlah semua lansia secara kumulatif yang dilayani dalam kurun waktu tertentu
Sumber Data	Register harian dan laporan bulanan program PTM
Target	20% jumlah pasien yang datang membutuhkan layanan kesehatan dapat terlayani
Penanggung Jawab	Petugas PTM

Judul	<b>Pelayanan Pemeriksaan Lansia</b>
Dimensi Mutu	Kompetensi, keselamatan dan kualitas
Tujuan	Semua lansia yang membutuhkan layanan kesehatan dapat terlayani dengan baik sesuai SOP
Definisi Operasional	Pelayanan kesehatan yang diberikan terhadap lansia yang membutuhkan pelayanan kesehatan agar tetap terpelihara kesehatannya sehingga dapat menjaga kondisi tetap sehat dan produktif sesuai kemampuannya
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap hari dan direkap setiap bulan
Periode Analisa	Tiap bulan
Numerator	Jumlah lansia yang datang dan dilayani oleh petugas kesehatan setiap hari
Denominator	Jumlah semua lansia secara kumulatif yang dilayani dalam kurun waktu tertentu
Sumber Data	Register harian dan laporan bulanan program lansia
Target	20% lansia yang datang membutuhkan layanan kesehatan dapat terlayani
Penanggung Jawab	Petugas Lansia



## 2. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut

Judul	<b>Pelayanan pemeriksaan gigi dan mulut</b>
Dimensi Mutu	Kompetensi, keselamatan dan kualitas sesuai SOP
Tujuan	Setiap pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan gigi dapat terlayani dengan baik sesuai SOP
Definisi Operasional	Pelayanan kesehatan gigi yang diberikan terhadap pasien yang membutuhkan pelayanan sehingga dapat mengatasi masalah kesehatan gigi
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap hari
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah pasien yang dilayani oleh petugas setiap hari
Denominator	Jumlah semua pasien yang dilayani petugas secara kumulatif dalam kurun waktu tertentu
Sumber Data	Laporan harian, laporan bulanan
Target	100% pasien yang datang dapat dilayani dengan baik
Penanggung Jawab	Dokter gigi dan perawat gigi

## 3. Pelayanan Kesehatan Keluarga yang bersifat UKP

Judul	<b>Pelayanan KIA</b>
Dimensi Mutu	Kompetensi, keselamatan dan kualitas
Tujuan	Semua PUS, Bumil, Bulin dan Bufas yang membutuhkan layanan kesehatan dapat terlayani dengan baik sesuai SOP
Definisi Operasional	Pelayanan kesehatan yang diberikan terhadap PUS, Bumil, Bulin, Bufas, Bayi dan Balita yang membutuhkan pelayanan kesehatan agar tetap terpelihara kesehatannya sehingga dapat menjaga kondisi tetap sehat dan produktif sesuai kemampuannya
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap hari dan direkap setiap bulan

Periode Analisa	Tiap bulan
Numerator	Jumlah PUS, Bumil, Bulin, Bufas, Bayi dan Balita yang datang dan dilayani oleh petugas kesehatan setiap hari
Denominator	Jumlah semua PUS, Bumil, Bulin, Bufas, Bayi dan Balita secara kumulatif yang dilayani dalam kurun waktu tertentu
Sumber Data	Register harian dan laporan bulanan program KIA
Target	100% lansia yang datang membutuhkan layanan kesehatan dapat terlayani
Penanggung Jawab	Bidan koordinator

Judul	<b>Pelayanan KB</b>
Dimensi Mutu	Kompetensi, keselamatan dan kualitas
Tujuan	Semua PUS yang membutuhkan layanan kesehatan dapat terlayani dengan baik sesuai SOP
Definisi Operasional	Pelayanan kesehatan yang diberikan terhadap PUS yang membutuhkan pelayanan kesehatan agar tetap terpelihara kesehatannya sehingga dapat menjaga kondisi tetap sehat dan produktif sesuai kemampuannya
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap hari dan direkap setiap bulan
Periode Analisa	Tiap bulan
Numerator	Jumlah PUS yang datang dan dilayani oleh petugas kesehatan setiap hari
Denominator	Jumlah semua PUS secara kumulatif yang dilayani dalam kurun waktu tertentu
Sumber Data	Register harian dan laporan bulanan program KIA
Target	100% PUS yang datang membutuhkan layanan kesehatan dapat terlayani
Penanggung Jawab	Bidan koordinator

Judul	<b>Pelayanan imunisasi</b>
Dimensi Mutu	Kompetensi, keselamatan dan kualitas serta taat SOP
Tujuan	Semua sasaran imunisasi dapat terlayani dengan baik dan sesuai SOP
Definisi Operasional	Pemberian imunisasi terhadap semua sasaran imunisasi (bayi) agar mendapatkan kekebalan tubuh terhadap beberapa penyakit PD3I
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap bulan, triwulan dan tahunan
Numerator	Jumlah sasaran yang mendapatkan imunisasi dari petugas kesehatan
Denominator	Jumlah kumulatif semua sasaran yang mendapatkan imunisasi dalam kurun waktu tertentu
Sumber Data	Laporan kegiatan bulanan petugas imunisasi
Target	97.5 %
Penanggung Jawab	Koordinator Imunisasi

Judul	<b>Pelayanan MTBS</b>
Dimensi Mutu	Kompetensi, keselamatan dan kualitas
Tujuan	Semua pasien Bayi Balita yang membutuhkan layanan kesehatan dapat terlayani dengan baik sesuai SOP
Definisi Operasional	Pelayanan kesehatan yang diberikan terhadap bayi Balita yang membutuhkan pelayanan kesehatan agar tetap terpelihara kesehatannya sehingga dapat menjaga kondisi tetap sehat dan produktif sesuai kemampuannya
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap hari dan direkap setiap bulan
Periode Analisa	Tiap bulan
Numerator	Jumlah Bayi Balita yang datang dan dilayani oleh petugas kesehatan setiap hari
Denominator	Jumlah semua bayi Balita secara kumulatif yang dilayani dalam kurun waktu tertentu

Sumber Data	Register harian dan laporan bulanan program MTBS
Target	100% Bayi Balita yang datang membutuhkan layanan kesehatan dapat terlayani
Penanggung Jawab	Bidan koordinator

#### 4. Pelayanan Gawat Darurat

Judul	<b>Pemberi pelayanan kegawat-daruratan bersertifikat (ATLS/ BTLS/ ACLS/ PPGD/ GELS) yang masih berlaku</b>
Dimensi Mutu	Kompetensi teknis
Tujuan	Tersedianya Pelayanan Gawat Darurat oleh tenaga yang kompeten dalam bidang kegawatdaruratan
Definisi Operasional	Tenaga kompeten pada gawat darurat adalah tenaga yang sudah memiliki sertifikat pelatihan ATLS/BTLS/ACLS/PPGD/GELS
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	3 bulan sekali
Numerator	Jumlah tenaga yang bersertifikat ATLS/BTLS/ACLS/PPGD/GELS
Denominator	Jumlah tenaga yang memberikan pelayanan kegawatdaruratan
Sumber Data	Kepegawaian
Target	100%
Penanggung Jawab	Dokter dan Perawat

Judul	<b>Kelengkapan inform consent sebelum tindakan medis</b>
Dimensi Mutu	Keselamatan
Tujuan	Tergambarnya tanggung jawab dokter untuk memberikan informasi kepada pasien dan mendapat persetujuan dari pasien akan tindakan medis yang akan dilakukan
Definisi Operasional	<i>Informed concent</i> adalah persetujuan yang

	diberikan pasien/keluarga pasien atas dasar penjelasan lengkap mengenai tindakan medis yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut
Frekuensi Pengumpulan Data	1 bulan
Periode Analisa	3 bulan
Numerator	Jumlah pasien yang mendapat tindakan medis yang disurvei yang mendapat informasi lengkap sebelum memberikan persetujuan tindakan medis dalam 1 bulan
Denominator	Jumlah pasien yang mendapat tindakan medis yang disurvei dalam 1 bulan
Sumber Data	Survei
Target	100%
Penanggung Jawab	Dokter dan Perawat

#### 5. Pelayanan Gizi yang bersifat UKP

Judul	<b>Pelayanan Konseling</b>
Dimensi Mutu	Kompetensi, keselamatan dan kualitas
Tujuan	Semua Pasien yang membutuhkan layanan kesehatan konseling dapat terlayani dengan baik sesuai SOP
Definisi Operasional	Pelayanan kesehatan yang diberikan terhadap pasien yang membutuhkan pelayanan konseling kesehatan agar tetap terpelihara kesehatannya sehingga dapat menjaga kondisi tetap sehat dan produktif sesuai kemampuannya
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap hari dan direkap setiap bulan
Periode Analisa	Tiap bulan
Numerator	Jumlah pasien yang datang dan dilayani oleh petugas kesehatan setiap hari
Denominator	Jumlah semua pasien secara kumulatif yang dilayani dalam kurun waktu tertentu
Sumber Data	Register harian dan laporan bulanan program Promkes

Target	5% Pasien yang datang membutuhkan layanan konseling kesehatan dapat terlayani
Penanggung Jawab	Petugas promkes

Judul	<b>Pelayanan SDIDTK</b>
Dimensi Mutu	Kompetensi, keselamatan dan kualitas
Tujuan	Semua bayi dan balita yang membutuhkan layanan kesehatan tumbuh kembang dapat terlayani dengan baik sesuai SOP
Definisi Operasional	Pelayanan kesehatan yang diberikan terhadap bayi dan balita yang membutuhkan pelayanan tumbuh kembang kesehatan agar tetap terpelihara kesehatannya sehingga dapat menjaga kondisi tetap sehat dan produktif sesuai kemampuannya
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap hari dan direkap setiap bulan
Periode Analisa	Tiap bulan
Numerator	Jumlah bayi dan balita yang datang dan dilayani oleh petugas kesehatan setiap hari
Denominator	Jumlah semua bayi dan balita secara kumulatif yang dilayani dalam kurun waktu tertentu
Sumber Data	Register harian dan laporan bulanan program Gizi
Target	2% bayi dan balita yang datang membutuhkan layanan kesehatan dapat terlayani
Penanggung Jawab	Petugas gizi

## 6. Pelayanan Kefarmasian

Judul	<b>Penulisan resep sesuai formularium</b>
Dimensi Mutu	Efisiensi
Tujuan	Tergambarnya efisiensi pelayanan obat kepada pasien
Definisi Operasional	Formularium obat adalah daftar obat yang digunakan di Puskesmas
Frekuensi Pengumpulan Data	1 bulan

Periode Analisa	3 bulan
Numerator	Jumlah resep yang diambil sebagai sample yang sesuai formularium dalam satu bulan.
Denominator	Jumlah seluruh resep yang diambil sebagai sampel dalam satu bulan (minimal 50)
Sumber Data	Resep
Target	100 %
Penanggung Jawab	Apoteker

Judul	<b>Pemberi pelayanan farmasi</b>
Dimensi Mutu	Keselamatan dan efektivitas
Tujuan	Kesiapan Puskesmas dalam memberikan pelayanan obat
Definisi Operasional	Pemberi pelayanan obat adalah asisten apoteker yang mempunyai kompetensi sesuai dengan standar Puskesmas
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah dan jenis tenaga yang ada di ruang/kamar obat
Denominator	Jumlah dan jenis seluruh tenaga yang ada di ruang/kamar obat
Sumber Data	Ruang obat
Standar	Tersedia tenaga Apoteker
Penanggung jawab	Apoteker

Judul	<b>Ketersediaan formularium</b>
Dimensi Mutu	Efisiensi
Tujuan	Tergambarnya efisiensi pelayanan obat kepada pasien
Definisi Operasional	Formularium obat adalah daftar obat yang digunakan di Puskesmas sesuai dengan formularium nasional
Frekuensi Pengumpulan Data	1 bulan
Periode Analisa	6 bulan

Numerator	Dokumen formularium
Denominator	Adanya Dokumen formularium
Sumber Data	LPLPO
Standar	Tersedianya dokumen formularium dan di perbaharui setiap 3 tahun
Penanggung Jawab	Apoteker

Judul	<b>Tidak adanya kejadian salah pemberian obat</b>
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kenyamanan
Tujuan	Tergambarnya kejadian kesalahan dalam pemberian obat
Definisi Operasional	Kesalahan pemberian obat, meliputi: 1. Salah dalam memberikan jenis obat 2. Salah dalam memberikan dosis 3. Salah identitas pasien 4. Salah waktu dan frekuensi pemberian obat 5. Salah cara pemberian obat
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah seluruh pasien instalasi obat yang diberikan obat dikurangi jumlah pasien yang mengalami kesalahan pemberian obat
Denominator	Jumlah seluruh pasien instalasi obat yang diberi obat
Sumber Data	Pasien
Standar	100%
Penanggung Jawab	Apoteker



## 7. Pelayanan Laboratorium

Judul	<b>Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium darah &lt; 30 menit</b>
Dimensi Mutu	Kualitas dan keamanan
Tujuan	Kesiapan Puskesmas dalam memberikan pelayanan laboratorium
Definisi Operasional	Pemberi pelayanan laboratorium adalah analis laboratorium yang mempunyai kompetensi sesuai dengan standar Puskesmas
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap hari
Periode Analisa	Setiap bulan sekali
Numerator	Jumlah dan jenis tenaga yang ada di ruang laboratorium
Denominator	Jumlah dan jenis seluruh tenaga yang ada di ruang laboratorium
Sumber Data	Ruang laboratorium
Target	Tersedia tenaga Analis
Penanggung Jawab	Petugas Analis

Judul	<b>Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium</b>
Dimensi Mutu	Keselamatan
Tujuan	Tergambarnya ketelitian pelayanan laboratorium
Definisi Operasional	Kesalahan administrasi dalam pelayanan laboratorium meliputi kesalahan identifikasi, kesalahan registrasi, kesalahan pelabelan sampel, dan kesalahan penyerahan hasil laboratorium
Frekuensi Pengumpulan Data	1 bulan
Periode Analisa	3 bulan
Numerator	Jumlah pasien yang diperiksa tanpa kesalahan administrasi dalam satu bulan
Denominator	Jumlah pasien yang diperiksa di laboratorium dalam bulan tersebut

Sumber Data	Catatan di laboratorium
Target	100%
Penanggung Jawab	Petugas Analis

Judul	<b>Kemampuan memeriksa HIV dan IMS</b>
Dimensi Mutu	Efektivitas dan keselamatan
Tujuan	Tergambarnya kemampuan laboratorium Puskesmas dalam memeriksa HIV dan IMS
Definisi Operasional	Pemeriksaan laboratorium HIV dan IMS adalah pemeriksaan <i>skrining</i> HIV dan IMS kepada pasien yang diduga mengidap HIV dan IMS
Frekuensi Pengumpulan Data	1 bulan
Periode Analisa	3 bulan
Numerator	Ketersediaan peralatan untuk pemeriksaan HIV dan IMS
Denominator	Sesuai dengan standar Puskesmas
Sumber Data	Catatan di laboratorium
Target	Ada alat
Penanggung Jawab	Petugas Analis

Judul	<b>Kemampuan Mikroskopis TB Paru</b>
Dimensi Mutu	Efektivitas dan keselamatan
Tujuan	Tergambarnya kemampuan laboratorium Puskesmas dalam memeriksa mikroskopis <i>tuberculosis</i> paru
Definisi Operasional	Pemeriksaan mikroskopis <i>tuberculosis</i> paru adalah pemeriksaan mikroskopis untuk mendeteksi adanya <i>mycobacterium tuberculosis</i> pada sediaan dahak pasien
Frekuensi Pengumpulan Data	1 bulan
Periode Analisa	3 bulan
Numerator	Ketersediaan tenaga terlatih, peralatan, dan reagen untuk pemeriksaan <i>tuberculosis</i>
Denominator	Sesuai dengan standar Puskesmas

Sumber Data	Catatan di laboratorium
Target	Tersedianya tenaga, peralatan, dan reagen
Penanggung Jawab	Petugas Analis

**BUPATI CIREBON,**

**ttd**

**IMRON**

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 3 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2020 NOMOR 126 SERI ■

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 123 TAHUN 2020

TANGGAL : 30 NOVEMBER 2020

TENTANG : STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA UNIT  
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT  
KESEHATAN MASYARAKAT SUMBER  
KABUPATEN CIREBON

**B. INDIKATOR SPM UKM**

**1. Pelayanan kesehatan ibu hamil**

Judul	<b>Pelayanan kesehatan ibu hamil</b>
Dimensi Mutu	Keselamatan
Tujuan	Tergambarnya kemampuan Puskesmas dalam mengakses pelayanan ibu hamil
Definisi Operasional	Pelayanan kesehatan ibu hamil adalah pelayanan kesehatan ibu hamil yang mendapatkan kunjungan 4 kali selama periode kehamilan sesuai standar 10T di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap hari
Periode Analisa	Setiap bulan
Nominator	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja dalam kurun waktu 1 tahun
Denominator	Jumlah sasaran bumil di wilayah kerja pada kurun waktu yang sama
Sumber Data	Buku KIA, Kohort ibu
Target	100%
Langkah Kegiatan	Pendataan bumil, pemeriksaan Antenatal, pengisian dan pemanfaatan buku KIA, pengisian kartu ibu dan Kohort, rujukan
Penanggung Jawab	Bidan koordinator KIA

**2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin**

Judul	<b>Pelayanan kesehatan ibu bersalin</b>
Dimensi Mutu	Akses dan keterjangkauan
Tujuan	Supaya persalinan di lakukan di fasilitas pelayanan kesehatan

Definisi Operasional	Pelayanan kesehatan ibu bersalin adalah pelayanan kesehatan ibu bersalin pada persalinan normal dan komplikasi sesuai standar di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	3 bulan
Nominator	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Semua persalinan yang dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja
Sumber Data	Buku KIA, Kohort ibu
Target	100%
Langkah Kegiatan	Pendataan sasaran ibu bersalin, pelayanan persalinan, pengisian dan pemanfaatan buku KIA, pengisian kartu ibu dan kohort ibu, Rujukan pertolongan persalinan (jika diperlukan)
Penanggung Jawab	Bidan koordinator KIA

### 3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir

Judul	<b>Pelayanan kesehatan bayi baru lahir</b>
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kontinuitas
Tujuan	Terpeliharanya kesehatan bayi umur 0-28 hari melalui pelayanan kesehatan maupun pelayanan melalui kunjungan rumah
Definisi Operasional	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir adalah jumlah bayi usia 0-28 yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap bulan
Nominator	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar, di wilayah kerja pada kurun waktu tertentu

Denominator	Seluruh bayi lahir hidup di wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu
Sumber Data	Kohort ibu, kohort bayi
Target	100%
Langkah Kegiatan	Pendataan bayi baru lahir, Pelayanan kesehatan bayi baru lahir, pengisian dan pemanfaatan buku KIA, Pencatatan dan pelaporan, Rujukan pertolongan kasus komplikasi pada bayi baru lahir (jika diperlukan)
Penanggung Jawab	Bidan koordinator KIA

#### 4. Pelayanan kesehatan balita

Judul	<b>Pelayanan kesehatan balita</b>
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kontinuitas
Tujuan	Menemukan secara dini gangguan kesehatan dan kelainan tumbuh kembang yang terjadi pada balita
Definisi Operasional	Pelayanan kesehatan balita adalah balita usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun meliputi : a. Pelayanan kesehatan balita sehat b. Pelayanan kesehatan balita sakit
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap hari
Periode Analisa	Setiap bulan
Nominator	Jumlah kumulatif balita umur 0-59 bulan yang dideteksi kesehatan dan tumbuh kembangnya sesuai standar oleh dokter bidan dan perawat di wilayah kerja pada kurun waktu tertentu
Denominator	Jumlah balita umur 0-59 bulan yang ada di wilayah kerja pada kurun waktu yang sama
Sumber Data	Kohort balita, Buku KIA, KMS dan Register MTBS
Target	100%
Langkah Kegiatan	Pendataan Balita, Pelayanan kesehatan balita (pelayanan dalam gedung dan luar gedung), Pengisian dan pemanfaatan buku KIA, Pencatatan dan pelaporan, pelayanan rujukan

Penanggung Jawab	Bidan koordinator KIA, koordinator MTBM, MTBS dan Nutrisionis
------------------	---

### 5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar

Judul	<b>Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar</b>
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kualitas
Tujuan	Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapat skrining kesehatan sesuai standar
Definisi Operasional	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar adalah pelayanan kesehatan pada anak usia pendidikan dasar kelas 1 sampai dengan kelas 9 sesuai standar di wilayah kerja minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun
Frekuensi Pengumpulan Data	Satu tahun sekali
Periode Analisa	Satu tahun sekali
Nominator	Jumlah anak usia pendidikan dasar kelas 1 sampai dengan 9 yang mendapat pelayanan skrining kesehatan
Denominator	Jumlah semua anak usia pendidikan dasar kelas 1 sampai dengan 9 di wilayah kerja pada kurun waktu yang sama
Sumber Data	Hasil pencatatan dan pelaporan penjangkaran anak sekolah (status gizi, tanda vital, kesehatan gigi dan mulut serta kesehatan indera)
Target	100%
Langkah Kegiatan	Pendataan sasaran, pelaksanaan skrining kesehatan, pelaksanaan tindak lanjut hasil skrining kesehatan, pencatatan dan pelaporan
Penanggung Jawab	Penanggung jawab program UKS

### 6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif

Judul	<b>Pelayanan kesehatan pada usia produktif</b>
Dimensi Mutu	Kualitas dan kontinuitas
Tujuan	Setiap warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar

Definisi Operasional	Pelayanan Kesehatan pada usia produktif adalah jumlah pengunjung usia 15-59 tahun yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap hari
Periode Analisa	Setiap bulan
Nominator	Jumlah pengunjung usia 15-59 tahun mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah warga negara usia 15-59 tahun yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama
Sumber Data	Hasil pencatatan dan pelaporan kunjungan pasien, serta hasil Kegiatan POSBINDU
Target	100%
Langkah Kegiatan	Skrining faktor resiko PTM, Konseling tentang faktor risiko PTM, Pelayanan rujukan kasus ke fasilitas kesehatan tingkat pertama, pencatatan dan pelaporan faktor risiko PTM
Penanggung Jawab	Penanggung jawab program PTM

## 7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut

Judul	<b>Pelayanan kesehatan pada usia lanjut</b>
Dimensi Mutu	Keselamatan
Tujuan	Melayani usia lanjut yang berbentuk upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif termasuk rujukannya
Definisi Operasional	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut adalah cakupan pengunjung usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode analisa	3 bulan sekali
Nominator	Jumlah pengunjung berusia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali setahun dalam kurun waktu 1 tahun



Denominator	Jumlah seluruh penduduk usia 60 tahun ke atas di wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama
Sumber data	Buku Pedoman Pembinaan kesehatan usia lanjut bagi petugas kesehatan Buku Pedoman Puskesmas santun usia lanjut bagi petugas kesehatan
Target	100%
Langkah Kegiatan	Pendataan sasaran Lansia, skrining kesehatan Lansia, pencatatan dan pelaporan, rujukan
Penanggung Jawab	Penanggung jawab program Lansia

### **8. Pelayanan kesehatan penderita Hipertensi**

Judul	<b>Pelayanan kesehatan penderita Hipertensi</b>
Dimensi Mutu	Keselamatan
Tujuan	Untuk memudahkan agar dapat dilakukan upaya promotif, preventif, dan kuratif sederhana
Definisi Operasional	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi adalah Setiap penderita hipertensi usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	3 bulan sekali
Nominator	Jumlah penderita hipertensi $\geq 15$ tahun di wilayah kerja yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah estimasi penderita hipertensi usia $\geq 15$ tahun yang berada di dalam wilayah kerja berdasarkan angka prevalensi Kabupaten dalam kurun waktu satu tahun pada tahun yang sama
Sumber Data	PIS-PK
Target	100%
Langkah Kegiatan	Pendataan penderita hipertensi, penemuan kasus hipertensi, pelayanan kesehatan sesuai standar, rujukan ke FKRTL sesuai kriteria

Penanggung Jawab	Penanggung jawab program PTM
------------------	------------------------------

### 9. Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Militus (DM)

Judul	<b>Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Militus (DM)</b>
Dimensi Mutu	Kesehatan, keselamatan
Tujuan	Sebagai acuan petugas untuk menemukan kasus baru penderita diabetes militus
Definisi Operasional	Pelayanan kesehatan penderita diabetes militus adalah Cakupan jumlah penderita diabetes militus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar pada usia 15 tahun ke atas
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap tahun
Nominator	Jumlah penderita diabetes militus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah estimasi penderita diabetes militus usia 15 tahun berdasarkan angka Prevalensi Kabupaten dalam kurun waktu satu tahun pada tahun yang sama
Sumber Data	Kohort kunjungan penderita diabetes militus
Standar	100%
Penanggung Jawab	Penanggung jawab program PTM

### 10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat

Judul	<b>Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat</b>
Dimensi Mutu	Keselamatan
Tujuan	pemeriksaan untuk melihat adanya gejala awal gangguan kesehatan jiwa dengan metode 2 menit
Definisi Operasional	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat adalah Jumlah ODGJ berat di Puskesmas mendapatkan pelayanan sesuai standar di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun

Frekuensi Pengumpulan Data	1 bulan sekali
Periode Analisa	1 bulan sekali
Nominator	Jumlah ODGJ berat di Puskesmas mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah ODGJ berat berdasarkan proyeksi di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun
Sumber data	Kohort kunjungan penderita ODGJ
Target	100%
Langkah Kegiatan	Penyediaan buku pedoman Keswa, Pelayanan kesehatan ODGJ berat di Puskesmas, pelaksanaan kunjungan rumah, monitoring dan evaluasi
Penanggung Jawab	Penanggung jawab program kesehatan jiwa

### 11. Pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis (TB)

Judul	<b>Pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis</b>
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kualitas
Tujuan	Setiap orang terduga TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar
Definisi Operasional	Pelayanan kesehatan orang dengan terduga Tuberkulosis adalah jumlah orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap minggu
Periode Analisa	Setiap bulan
Numerator	Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah orang yang terduga TBC dalam kurun waktu satu tahun yang sama
Sumber Data	Laporan TB
Target	100%
Langkah Kegiatan	Peningkatan SDM TB, penyediaan KIE TB, pelayanan dan pemeriksaan TB, rujukan kasus TB, jejaring kemitraan pelayanan TB, pencatatan

	pelaporan, monitoring dan evaluasi
Penanggung Jawab	Penanggung jawab program TB

**12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)**

Judul	<b>Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV</b>
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kualitas
Tujuan	Setiap orang beresiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza dan warga binaan lembaga permasyarakatan) mendapat pemeriksaan HIV sesuai standar
Definisi Operasional	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV adalah pelayanan sesuai standar bagi orang dengan risiko terinfeksi HIV dinilai dari persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan HIV dalam kurun satu tahun
Frekuensi Pengumpulan Data	Satu minggu satu kali
Periode Analisa	Setiap satu tahun
Nominator	Jumlah orang beresiko terinfeksi HIV yang mendapat pengobatan HIV sesuai standar fasyankes dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV dalam kurun waktu satu tahun yang sama
Sumber Data	Laporan Program
Target	100%
Langkah Kegiatan	Penentuan sasaran, pemetaan penemuan kelompok sasaran, promosi kesehatan dan penyuluhan, jejaring kerja dan kemitraan, sosialisasi pencegahan, pemeriksaan deteksi dini, pencatatan dan pelaporan
Penanggung Jawab	Penanggung jawab program HIV

### 13. Pelayanan Imunisasi

#### a. Cakupan Desa *Universal Child Immunization* (UCI)

Judul	<b>Cakupan Desa <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)</b>
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kualitas
Tujuan	Mengetahui akses wilayah terhadap kelengkapan dan intensitas imunitas yang didapatkan terhadap sasaran bayi (0-12 bulan)
Definisi Operasional	Cakupan desa UCI adalah desa dimana $\geq 80\%$ dari jumlah bayi yang ada di desa tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap dalam satu tahun
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap bulan
Nominator	Jumlah desa UCI di wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu
Denominator	Jumlah desa yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu
Sumber Data	Kohort bayi, KMS/buku KIA serta buku catatan imunisasi
Target	100%
Langkah Kegiatan	Pendataan sasaran, perencanaan dan pengambilan logistik dan PWS imunisasi dan Monev
Penanggung Jawab	Koordinator imunisasi dan bidan penanggung jawab desa

#### b. Pelayanan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)

Judul	<b>Pelayanan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)</b>
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kualitas
Tujuan	Memberikan kekebalan terhadap penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I)
Definisi Operasional	Cakupan IDL adalah Cakupan bayi 0-11 bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap (HBO 1 kali, BCG 1 kali, Polio 4 kali, DPTHB-Hib 3 kali, Campak 1 kali) di wilayah kerja Puskesmas pada kurun waktu satu tahun
Frekuensi pengumpulan data	Setiap bulan

Periode analisa	Setiap bulan
Nominator	Jumlah bayi 0-11 bulan mendapatkan imunisasi di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah sasaran bayi 0-11 bulan di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun x 100%
Sumber Data	SIMPUS, kohort bayi, KMS/buku KIA serta buku catatan imunisasi
Target	100%
Langkah Kegiatan	Pendataan sasaran, perencanaan dan pengambilan logistik, pelayanan imunisasi dan PWS imunisasi
Penanggung Jawab	Koordinator imunisasi dan bidan penanggung jawab desa

### c. Cakupan BIAS Td

Judul	<b>Cakupan BIAS Td</b>
Dimensi Mutu	Keselamatan
Tujuan	Pemberian imunisasi Td kepada seluruh siswa kelas 2 dan 5 Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) negeri atau yang sederajat, laki-laki dan perempuan di wilayah kerja Puskesmas
Definisi Operasional	Cakupan Bias Td adalah jumlah siswa kelas 2 dan kelas 5 Sekolah dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau yang sederajat, laki-laki dan perempuan yang mendapatkan imunisasi Td di wilayah kerja Puskesmas pada kurun waktu satu tahun
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode analisa	Setiap bulan
Nominator	Jumlah siswa kelas 2 dan kelas 5 Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang mendapat imunisasi Td di wilayah kerja Puskesmas pada kurun satu tahun
Denominator	Jumlah siswa kelas 2 dan kelas 5 Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau yang

	sederajat di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Sumber Data	Laporan Bias
Target	100%
Langkah Kegiatan	Pendataan sasaran, perencanaan dan pengambilan logistik
Penanggung Jawab	Koordinator imunisasi

#### **d. Cakupan BIAS DT**

Judul	<b>Cakupan BIAS DT</b>
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kualitas
Tujuan	Memberikan boster DT kepada anak kelas I SD sehingga menambah kekebalan anak dan terhindar dari penyakit difteri dan tetanus maupun komplikasinya
Definisi Operasional	Cakupan BIAS DT kelas I SD adalah Kegiatan imunisasi anak SD dan sederajat dengan memberikan suntik DT pada murid kelas 1 SD.
Frekuensi Pengumpulan Data	Satu kali satu tahun
Periode Analisa	Satu kali satu tahun
Nominator	Jumlah murid kelas I SD yang mendapatkan imunisasi DT di wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu
Denominator	Jumlah murid kelas I SD yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu
Sumber Data	Data anak SD kelas I absensi kelas
Target	100%
Langkah Kegiatan	Pendataan sasaran, perencanaan dan pengambilan logistik
Penanggung Jawab	Koordinator imunisasi

#### **e. Cakupan BIAS campak**

Judul	<b>Cakupan BIAS campak</b>
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kualitas
Tujuan	Memberikan boster campak kepada anak kelas 1 SD sehingga menambah kekebalan anak dan terhindar dari penyakit campak dan komplikasi campak

Definisi Operasional	Cakupan BIAS kelas 1 SD adalah kegiatan imunisasi anak SD dan sederajat dengan memberikan suntikan campak dilengan kiri pada anak SD kelas 1
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan September
Periode Analisa	Setiap bulan September
Nominator	Jumlah murid kelas 1 SD yang mendapat imunisasi campak di wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu
Denominator	Jumlah murid kelas 1 SD yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu
Sumber data	Data anak SD kelas 1, absensi kelas
Target	100%
Langkah Kegiatan	Pendataan sasaran, perencanaan dan pengambilan logistik dan PWS imunisasi
Penanggung Jawab	Koordinator imunisasi

#### 14. Pelayanan penyakit menular lainnya

##### a. Release From Treatment (RFT) RATE MB

Judul	<b>Release From Treatment (RFT) RATE MB</b>
Dimensi Mutu	Akses, hubungan antar manusia, efisiensi
Tujuan	Untuk mengetahui jumlah penderita kusta yang telah selesai dan sembuh dari pengobatan MB
Definisi Operasional	Adalah persentase yang menunjukkan jumlah pasien atau orang yang telah menyelesaikan pengobatan MB pada kurun waktu tertentu
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap tiga bulan
Nominator	Jumlah pasien yang telah menyelesaikan pengobatan MB
Denominator	Jumlah seluruh pasien yang memulai pengobatan MB pada kurun waktu yang sama
Sumber data	Programer kusta
Target	100%
Penanggung jawab	Penanggung jawab program kusta



**b. Angka bebas jentik (ABJ)**

Judul	<b>Angka bebas jentik (ABJ)</b>
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kualitas
Tujuan	Berkurangnya Penderita kasus DBD di wilayah kerja
Definisi Operasional	Persentase rumah dan tempat-tempat umum yang diperiksa jentik
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap bulan
Nominator	Jumlah rumah dan tempat umum yang diperiksa jentik dan hasilnya negatif tidak ada jentik dalam waktu 1 tahun
Denominator	Jumlah rumah dan tempat-tempat umum yang diperiksa jentik x 100%
Sumber data	Laporan P2 DBD, SP2TP
Target	100%
Langkah Kegiatan	Penegakan diagnosa, tatalaksana, monev, dan Promkes
Penanggung Jawab	Penanggung jawab program DBD

**c. Penemuan penderita pneumonia balita**

Judul	<b>Penemuan penderita pneumonia balita</b>
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kualitas
Tujuan	Balita yang menderita Pneumonia mendapatkan tatalaksana penanganan sesuai standar
Definisi Operasional	Cakupan penemuan penderita pneumonia balita adalah persentase balita dengan pneumonia yang ditemukan dan diberikan tatalaksana sesuai standar di sarana kesehatan di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun.
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap bulan
Nominator	Jumlah penderita pneumonia balita yang ditangani di wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu

Denominator	Jumlah perkiraan penderita pneumonia balita di wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama
Sumber Data	Laporan P2 ISPA
Target	86 %
Langkah Kegiatan	Penemuan penderita, pengobatan, kunjungan rumah, promosi kesehatan dan monev
Penanggung Jawab	Penanggung jawab program ISPA

#### **d. Penemuan penderita diare**

Judul	<b>Penemuan penderita diare</b>
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kualitas
Tujuan	Pasien dengan diare mendapatkan tatalaksana penanganan sesuai standar sehingga tidak berakibat dehidrasi
Definisi Operasional	Pasien dengan diare yang ditangani adalah pasien dengan diare yang penanganannya sesuai dengan standar di wilayah kerja dalam periode/kurun waktu tertentu
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap bulan
Nominator	Jumlah penderita dengan diare yang ditangani sesuai standar di wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu
Denominator	Jumlah seluruh penderita dengan diare yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama
Sumber Data	Laporan P2 diare, SP2TP
Target	100%
Langkah Kegiatan	Penegakan diagnosa, tatalaksana, Monev dan Promkes
Penanggung Jawab	Penanggung jawab program diare

#### **e. Cakupan tatalaksana kasus Filariasis**

Judul	<b>Cakupan tatalaksana kasus Filariasis</b>
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kualitas
Tujuan	Pasien dengan filariasis mendapatkan tatalaksana penanganan sesuai standar

Definisi Operasional	Cakupan Pelayanan Penderita Filariasis adalah persentase kasus Filariasis yang dilakukan tatalaksana minimal 7 kali kunjungan rumah di wilayah kerja Puskesmas dalam waktu satu tahun.
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap bulan
Nominator	Jumlah kasus Filariasis yang dilakukan tatalaksana Filariasis
Denominator	Jumlah kasus Filariasis yang ditemukan dalam 1 tahun dikali 100%
Sumber data	Laporan P2 filariasis, SP2TP
Target	100%
Langkah Kegiatan	Penegakan diagnosa, tatalaksana, monev dan promkes
Penanggung jawab	Koordinator P2M dan surveilans

### 15. Pelayanan promosi kesehatan

Judul	<b>Pembinaan PHBS di tatanan rumah tangga</b>
Dimensi Mutu	Kualitas
Tujuan	Pengkajian dan pembinaan PHBS di tatanan rumah tangga dengan melihat 10 indikator perilaku di rumah tangga
Definisi Operasional	Cakupan rumah tangga ber PHBS adalah persentase rumah tangga yang melaksanakan 10 indikator PHBS rumah tangga di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Frekuensi Pengumpulan Data	1 bulan sekali
Periode Analisa	1 bulan sekali
Nominator	Jumlah rumah tangga ber PHBS di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah seluruh rumah tangga yang ada di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Sumber Data	Hasil pendataan PHBS
Target	65%
Langkah Kegiatan	Penentuan RT yang disurvei, kunjungan rumah, pengkajian, analisa, tindak lanjut

Penanggung Jawab	Penanggung jawab program Promkes
------------------	----------------------------------

## 16. Pelayanan kesehatan lingkungan

Judul	<b>Pengawasan rumah sehat</b>
Dimensi Mutu	Kualitas
Tujuan	Mengawasi rumah tinggal yang memenuhi syarat kesehatan yaitu rumah yang memiliki jamban sehat, sarana air bersih, pembuangan sampah, sarana pembuangan air limbah, ventilasi yang baik, kepadatan hunian rumah yang sesuai dan lantai yang tidak terbuat dari tanah (kedap air)
Definisi Operasional	Cakupan rumah sehat adalah persentase jumlah rumah sehat yang ada di wilayah kerja Puskesmas pada kurun waktu 1 tahun
Frekuensi Pengumpulan Data	1 bulan sekali
Periode Analisa	1 bulan sekali
Nominator	Jumlah rumah sehat di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah rumah yang ada di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Sumber Data	Buku catatan kegiatan di lapangan Buku kunjungan lapangan Register kesehatan lingkungan Register penyuluhan Laporan LB4
Target	75%
Langkah Kegiatan	Melakukan kunjungan rumah dalam pengawasan rumah sehat
Penanggung Jawab	Penanggung jawab program Kesling

## 17. Upaya perbaikan gizi masyarakat

### a. ASI Eksklusif

Judul	<b>ASI Eksklusif</b>
Dimensi Mutu	Keselamatan
Tujuan	Untuk meningkatkan kekebalan tubuh bayi serta membantu melindungi dari berbagai penyakit dan infeksi agar tidak mudah sakit

Definisi Operasional	Bayi yang diberi ASI Eksklusif adalah proses pemberian ASI Eksklusif pada bayi menginjak usia 6 bulan
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap 3 bulan
Nominator	Semua bayi yang memperoleh ASI Eksklusif
Denominator	Semua bayi yang baru lahir
Sumber Data	Buku KIA
Standar	100%
Penanggung Jawab	Penanggung jawab program gizi

**b. Remaja putri mendapat tablet tambah darah (TTD)**

Judul	<b>Remaja putri mendapat TTD</b>
Dimensi Mutu	Keselamatan
Tujuan	Untuk mencegah kematian dan komplikasi
Definisi Operasional	Persentase remaja putri mendapat TTD adalah jumlah remaja putri yang mendapat TTD secara rutin setiap minggu terhadap jumlah remaja putri yang ada dikali 100%
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap bulan
Nominator	Jumlah remaja putri mendapat TTD
Denominator	Jumlah seluruh remaja putri 12-18 tahun di sekolah dikali 100%
Sumber Data	Laporan Gizi
Standar	100%
Penanggung Jawab	Penanggung jawab program gizi

**c. Persentase Balita Kurus mendapat Makanan Tambahan**

Judul	<b>Persentase Balita Kurus mendapat Makanan Tambahan</b>
Dimensi Mutu	Keselamatan
Tujuan	Untuk mencegah kematian dan komplikasi
Definisi Operasional	Persentase balita kurus mendapat makanan tambahan adalah jumlah balita kurus yang mendapat makanan tambahan terhadap jumlah balita kurus dikali 100%.

Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap bulan
Nominator	Jumlah balita kurus yang mendapat makanan tambahan
Denominator	Jumlah seluruh balita kurus yang ada dikali 100%
Sumber Data	Laporan Gizi
Standar	100%
Penanggung Jawab	Penanggung jawab program gizi

### 18. Pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat

Judul	<b>Cakupan keluarga resiko tinggi mendapat askep keluarga</b>
Dimensi Mutu	Keselamatan
Tujuan	Meningkatkan kemandirian keluarga untuk mengatasi masalah kesehatan
Definisi Operasional	Jumlah keluarga yang mendapat asuhan keperawatan keluarga dan terdokumentasi melalui askep keluarga
Frekuensi Pengumpulan Data	1 bulan sekali
Periode analisa	1 bulan sekali
Nominator	Jumlah keluarga yang mendapat asuhan keperawatan di wilayah kerja Puskesmas
Denominator	Jumlah keluarga rawan yang ada di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Sumber data	Kohort PHN
Target	88%
Langkah Kegiatan	Pendataan sasaran, kunjungan rumah, penyuluhan, memberikan asuhan keperawatan, pencatatan dan pelaporan
Penanggung Jawab	Penanggung jawab program Perkesmas

### 19. Pelayanan kesehatan gigi masyarakat

#### a. Pembinaan kesehatan gigi di masyarakat

Judul	<b>Pembinaan kesehatan gigi di masyarakat</b>
Dimensi Mutu	Kualitas
Tujuan	Pendekatan edukatif yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan peran serta

	masyarakat dalam pemeliharaan kesehatan gigi, dengan mengintegrasikan upaya promotif, preventif, kesehatan gigi pada berbagai upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang berlandaskan pendekatan <i>Primary Health care</i>
Definisi Operasional	Cakupan UKBM adalah persentase UKBM yang mendapat pembinaan dari petugas Puskesmas di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu setahun
Frekuensi Pengumpulan Data	1 bulan sekali
Periode analisa	1 bulan sekali
Nominator	Jumlah UKBM yang mendapat pembinaan di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah UKBM yang ada di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Sumber Data	Buku catatan pembinaan ke UKBM
Target	60%
Langkah Kegiatan	Pendataan, pengaturan pelayanan dan petugas, pelayanan kesehatan tingkat pertama
Penanggung Jawab	Penanggung jawab program kesehatan gigi dan mulut

**b. Cakupan pembinaan kesehatan gigi dan mulut di SD/MI**

Judul	<b>Cakupan pembinaan kesehatan gigi dan mulut di SD/MI</b>
Dimensi Mutu	Kualitas
Tujuan	Pelayanan asuhan sistematis yang ditujukan bagi semua anak sekolah tingkat pendidikan dasar dalam bentuk paket promotive, paket preventif, dan paket paripurna.
Definisi Operasional	Cakupan pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut siswa SD adalah persentase siswa SD yang mendapat pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut dari petugas Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun

Frekuensi Pengumpulan Data	1 bulan sekali
Periode analisa	1 bulan sekali
Nominator	Jumlah siswa SD yang mendapat pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut oleh petugas Puskesmas di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah siswa SD yang berada di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun dikali 100%
Sumber data	Catatan pembinaan yang dilakukan ke SD/MI
Target	80%
Langkah Kegiatan	Pendataan, pengaturan pelayanan dan petugas, pelayanan kesehatan tingkat pertama
Penanggung Jawab	Penanggung jawab program kesehatan gigi dan mulut

## 20. Pelayanan kesehatan kerja

Judul	<b>Jumlah pos upaya kesehatan kerja (UKK) yang terbentuk di Wilayah Kerja Puskesmas</b>
Dimensi Mutu	Keselamatan
Tujuan	Pembinaan kesehatan kerja dalam pelayanan kesehatan bagi pekerja yang meliputi upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit akibat kerja, promotif, penyembuhan penyakit, dan pemulihan kesehatan yang merupakan hak-hak dasar pekerja
Definisi Operasional	Jumlah Pos UKK yang terbentuk minimal 1 (satu) Puskesmas terbentuk 1 (satu) Pos UKK di wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun
Frekuensi Pengumpulan Data	1 tahun 2 kali
Periode Analisa	1 tahun 2 kali
Nominator	Jumlah Pos UKK yang terbentuk di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	1 (satu) pos UKK yang terbentuk yang ada di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun dikali 100%



Sumber data	Ada laporan/catatan Kegiatan kesja (Pos UKK) di Puskesmas sesuai kebutuhan lingkungan berupa pembinaan kesehatan kerja di Pos UKK (Promotif, Preventif, Kuratif)
Target	100%
Langkah Kegiatan	Pendataan, sosialisasi, perencanaan kegiatan pelayanan dan Monev
Penanggung Jawab	Penanggung jawab program UKK

## 21. Pelayanan kesehatan olahraga

Judul	<b>Pembinaan kelompok olahraga</b>
Dimensi Mutu	Kualitas
Tujuan	Meningkatkan derajat kesehatan dan kebugaran jasmani melalui kegiatan aktifitas fisik dan/atau olahraga
Definisi Operasional	Cakupan pembinaan kelompok olahraga adalah cakupan kelompok olahraga di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun, yang mendapat pembinaan dari petugas Puskesmas
Frekuensi Pengumpulan Data	1 tahun 2 kali
Periode Analisa	1 tahun 2 kali
Nominator	Jumlah kelompok olahraga yang mendapat pembinaan dari petugas Puskesmas di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah seluruh kelompok olahraga yang berada di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Sumber Data	Format laporan kesehatan olahraga Puskesmas
Target	100%
Langkah Kegiatan	Pendataan, Penyediaan KIE, pembinaan dan pengukuran kebugaran, pencatatan pelaporan
Penanggung Jawab	Penanggung jawab program kesehatan olahraga

## 22. Pelayanan Kesehatan tradisional komplementer

Judul	<b>Pembinaan upaya kesehatan tradisional</b>
Dimensi Mutu	Kualitas dan kuantitas
Tujuan	Membina penyehat tradisional
Definisi Operasional	Cakupan Pembinaan upaya kesehatan tradisional adalah Cakupan penyehat tradisional yang dibina oleh petugas Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Frekuensi Pengumpulan Data	6 bulan sekali
Periode Analisa	1 tahun sekali
Nominator	Jumlah penyehat tradisional yang mendapat pembinaan dari petugas Puskesmas
Denominator	Jumlah penyehat tradisional yang ada di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Sumber data	Register Pelayanan Kesehatan Tradisional
Target	100%
Langkah Kegiatan	Perencanaan, pelaksanaan kegiatan, pelaporan, monitoring dan evaluasi
Penanggung Jawab	Penanggung jawab program Batra

## 23. Pelayanan kesehatan indera

### a. Penanganan kasus kelainan refraksi

Judul	<b>Penanganan kasus kelainan refraksi</b>
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kontinuitas
Tujuan	Pemberitahuan kepada orang tua murid tentang gangguan refraksinya untuk ditindaklanjuti dengan pemeriksaan ulang ke dokter mata untuk diberikan kaca mata sesuai dengan ukurannya
Definisi Operasional	Cakupan penanganan kasus kelainan refraksi adalah persentase jumlah penanganan kasus dengan kelainan refraksi pada siswa kelas V s.d IX di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Frekuensi Pengumpulan Data	3 bulan sekali
Periode Analisa	3 bulan sekali
Nominator	Jumlah kasus kelainan refraksi yang ditangani

	pada siswa kelas V s.d IX di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah kasus kelainan refraksi yang ditemukan pada siswa kelas V s.d IX di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Sumber Data	Buku catatan kelainan refraksi
Target	100%
Langkah Kegiatan	Persiapan pra pelayanan, kompetensi tenaga, waktu pelayanan, rujukan, pencatatan dan pelaporan
Penanggung Jawab	Penanggung jawab program kesehatan indera

#### **b. Penanganan penyakit katarak**

Judul	<b>Penanganan penyakit katarak</b>
Dimensi Mutu	Keselamatan
Tujuan	Menangani lebih lanjut penderita katarak dengan melalui tindakan operasi
Definisi Operasional	Cakupan Penanganan penyakit katarak adalah persentase jumlah penanganan penyakit katarak di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap bulan
Nominator	Jumlah pasien katarak yang di operasi di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Denominator	Jumlah pasien terdeteksi katarak di wilayah kerja Puskesmas dalam kurun waktu satu tahun
Sumber Data	Laporan Kegiatan Operasi katarak
Target	100%
Langkah Kegiatan	Persiapan pra pelayanan, kompetensi tenaga, waktu pelayanan, rujukan, pencatatan dan pelaporan
Penanggung Jawab	Penanggung jawab program kesehatan indera

## 24. Pelayanan kesehatan pengembangan lainnya (Surveilans)

### a. Cakupan kelengkapan surveilans terpadu penyakit

Judul	<b>Cakupan kelengkapan surveilans terpadu penyakit</b>
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kualitas
Tujuan	Penyelenggaraan surveilans Epidemiologi terhadap beberapa kejadian, permasalahan dan faktor risiko masalah penyakit menular dan tidak menular
Definisi Operasional	Cakupan kelengkapan Surveilans terpadu penyakit adalah cakupan kelengkapan pengumpulan data hasil pengamatan penyakit bulanan di wilayah Puskesmas dalam waktu satu tahun
Frekuensi Pengumpulan Data	Setiap bulan
Periode Analisa	Setiap bulan
Nominator	Jumlah laporan STP yang dilaporkan Puskesmas pada kurun waktu satu tahun
Denominator	12 bulan dikali 100%
Sumber Data	Laporan kelengkapan laporan STP Puskesmas
Target	100%
Langkah Kegiatan	Pengumpulan dan pengolahan data laporan penyakit, penanganan kasus potensi KLB, Pencatatan pelaporan, monitoring dan evaluasi
Penanggung jawab	Penanggung jawab Surveilans

### b. Cakupan ketepatan surveilans terpadu penyakit

Judul	<b>Cakupan ketepatan surveilans terpadu penyakit</b>
Dimensi Mutu	Keselamatan dan kualitas
Tujuan	Untuk membantu penyelenggaraan kegiatan surveilans Epidemiologi terhadap beberapa kejadian, permasalahan dan faktor risiko masalah penyakit menular dan tidak menular
Definisi Operasional	Cakupan ketepatan Surveilans terpadu penyakit adalah cakupan ketepatan pengumpulan data hasil pengamatan penyakit bulanan di wilayah Puskesmas dalam waktu satu tahun
Frekuensi pengumpulan data	Setiap bulan

Periode analisa	Setiap bulan
Nominator	Jumlah laporan STP yang dilaporkan Puskesmas tepat waktu pada kurun waktu satu tahun
Denominator	12 bulan x 100 %
Sumber data	Laporan ketepatan laporan STP Puskesmas
Target	100 %
Langkah Kegiatan	Pengumpulan dan pengolahan data laporan penyakit, penanganan kasus potensi KLB, pencatatan pelaporan, monitoring dan evaluasi
Penanggung jawab	Surveilans

**BUPATI CIREBON,**

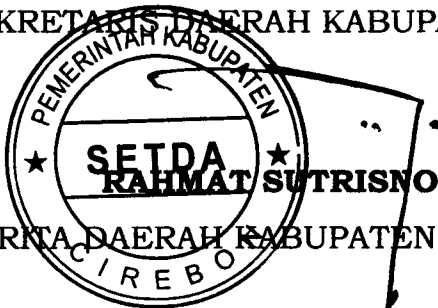
**ttd**

**IMRON**

Diundangkan di Sumber

Pada tanggal **3 Desember 2020**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2020 NOMOR **126** SERI **B**